

Ketahanan Pangan sebagai Fondasi Stabilitas Ekonomi Indonesia

Oleh: Rudy C Tarumingkeng



Oleh:

[Prof Ir Rudy C Tarumingkeng, PhD](#)

Professor of Management NUP: 9903252922

Rektor, Universitas Cenderawasih, Papua (1978-1988, dan
Rektor, Kampus AGRO Manokwari sekarang Universitas Papua Manokwari)

Coordinator, CIDA/DIKTI SFU Burnaby BC Canada 1988-1991

Rektor, Universitas Kristen Krida Wacana, Jakarta (1991-2000)

Ketua Dewan Guru Besar, IPB-University, Bogor (2005-2006)

AI - Data Analyst, dan Ketua Senat Akademik, IBM-ASMI, Jakarta 2024-

© RudyCT Academic Series

rudyct75@gmail.com

6 Maret 2026

KETAHANAN PANGAN SEBAGAI FONDASI STABILITAS EKONOMI INDONESIA

Pendahuluan

Ketahanan pangan bukan sekadar isu pertanian, dan juga bukan semata-mata soal ketersediaan beras di pasar. Dalam konteks ekonomi modern, ketahanan pangan adalah pilar yang menopang stabilitas harga, daya beli rumah tangga, kualitas sumber daya manusia, keberlanjutan fiskal, bahkan legitimasi kebijakan publik. Di negara sebesar Indonesia—dengan jumlah penduduk yang sangat besar, bentang geografis kepulauan yang kompleks, kerentanan iklim yang nyata, dan ketimpangan antarwilayah yang masih lebar—ketahanan pangan harus dipahami sebagai fondasi stabilitas ekonomi nasional, bukan sebagai agenda sektoral yang berdiri sendiri. Visi ini juga makin ditekankan dalam agenda perencanaan nasional 2025–2029, yang menempatkan transformasi sistem pangan, swasembada pangan, dan pendekatan nexus pangan–energi–air sebagai bagian dari strategi pembangunan jangka menengah. ([Bappenas](#))

Alasan pertama mengapa ketahanan pangan menjadi fondasi stabilitas ekonomi adalah karena pangan menempati posisi sentral dalam struktur

konsumsi rumah tangga Indonesia. Kenaikan harga pangan secara langsung menggerus daya beli masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan yang proporsi pengeluarannya untuk makanan jauh lebih besar dibanding kelompok pendapatan menengah-atas. Dalam praktiknya, gejolak harga beras, cabai, bawang merah, daging ayam, dan telur kerap menjadi pemicu inflasi yang paling terasa di tingkat rumah tangga. Bank Indonesia pada akhir 2025 mencatat inflasi Indeks Harga Konsumen tetap berada dalam sasaran, tetapi kelompok volatile food masih relatif tinggi, terutama karena keterbatasan pasokan dan gangguan cuaca. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas makro tidak akan kokoh bila fondasi pangannya rapuh. ([Bank Indonesia](#))

Alasan kedua, ketahanan pangan berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Pada triwulan I-2025, sektor pertanian Indonesia tumbuh 10,52 persen secara tahunan, ditopang antara lain oleh peningkatan produksi padi dan jagung. Kinerja ini membantu menopang pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 4,87 persen pada periode yang sama. Fakta ini penting: ketika produksi pangan menguat, bukan hanya petani yang memperoleh manfaat, tetapi juga industri pengolahan, perdagangan, logistik, dan konsumsi rumah tangga ikut terdorong. Dengan kata lain, pangan memiliki efek berganda ke belakang dan ke depan dalam sistem ekonomi nasional. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Alasan ketiga, ketahanan pangan adalah prasyarat bagi kualitas manusia. Ketahanan pangan yang hanya dipahami sebagai "cukup kalori" tidak lagi memadai. Sistem pangan harus mampu menghadirkan diet sehat, aman, terjangkau, dan bergizi. FAO mencatat bahwa tingginya inflasi pangan melemahkan daya beli dan akses terhadap diet sehat, sementara di Indonesia hampir separuh penduduk masih tidak mampu membeli makanan sehat dan bergizi; FAO di Indonesia juga mengutip data Kementerian Kesehatan 2023 bahwa 21,5 persen balita masih mengalami stunting. Dengan demikian, pembicaraan tentang ketahanan pangan

harus menghubungkan produksi, distribusi, harga, nutrisi, dan produktivitas tenaga kerja masa depan. ([FAOHome](#))

Esai ini berangkat dari tesis bahwa ketahanan pangan adalah basis stabilitas ekonomi Indonesia karena ia memengaruhi secara serentak inflasi, konsumsi rumah tangga, kemiskinan, produktivitas, investasi, dan kohesi sosial. Karena itu, pembangunan ekonomi Indonesia tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan PDB; ia harus memastikan sistem pangan yang tangguh dari hulu ke hilir. Di bawah ini akan dibahas makna konseptual ketahanan pangan, keterkaitannya dengan stabilitas makroekonomi, tantangan struktural Indonesia, dimensi sosial dan kewilayahan, peran negara dan pasar, serta arah kebijakan yang perlu diperkuat.

1. Memahami Ketahanan Pangan secara Lebih Luas

Secara klasik, ketahanan pangan sering dipahami melalui empat dimensi: ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas. Ketersediaan berarti pangan cukup secara fisik; akses berarti masyarakat mampu memperolehnya secara ekonomi dan geografis; pemanfaatan berarti pangan tersebut aman, bergizi, dan mendukung kesehatan; stabilitas berarti tiga dimensi tadi tidak terganggu oleh guncangan musiman, ekonomi, atau bencana. Rumusan ini tetap relevan, tetapi dalam konteks Indonesia abad ke-21, ketahanan pangan perlu diperluas menjadi ketahanan sistem pangan. Artinya, yang dijaga bukan hanya stok akhir, melainkan seluruh ekosistem produksi, distribusi, logistik, pasar, konsumsi, data, dan tata kelola. FAO menekankan bahwa inflasi pangan tinggi dapat merusak akses terhadap diet sehat, sehingga fokus kebijakan tidak cukup pada tonase produksi semata. ([FAOHome](#))

Dalam perspektif ekonomi pembangunan, ketahanan pangan dapat dipandang sebagai barang publik strategis. Ia tidak sepenuhnya dapat diserahkan kepada mekanisme pasar, sebab pasar pangan sangat peka terhadap cuaca, biaya transportasi, gangguan distribusi, perubahan kebijakan dagang, ekspektasi pelaku pasar, dan perilaku spekulatif. Karena itu, negara selalu hadir dalam beragam bentuk: cadangan pangan, subsidi tertentu, bantuan sosial, stabilisasi harga, riset pertanian, pembangunan irigasi, perlindungan lahan, data pangan, dan sistem peringatan dini. Indonesia juga menggunakan instrumen stabilisasi melalui cadangan strategis dan pelepasan stok ketika harga beras melonjak. Pada September 2025, World Bank mencatat bahwa ketika harga beras ritel melonjak tajam pada Juli–Agustus 2025, pemerintah merespons melalui program stabilisasi pasokan dan harga, termasuk pelepasan 1,3 juta metrik ton dari cadangan strategis 3,95 juta metrik ton. Ini menegaskan bahwa pangan adalah sektor di mana kapasitas negara menentukan ketahanan ekonomi.

Dari sudut pandang manajemen strategis, ketahanan pangan juga merupakan isu resiliensi. Sistem yang resilien bukan sistem yang tidak pernah terguncang, melainkan sistem yang mampu menyerap, menyesuaikan, dan pulih dengan cepat ketika terjadi gangguan. Dalam kasus Indonesia, gangguan dapat berasal dari El Niño, banjir, serangan hama, kenaikan harga pupuk, disrupsi logistik antar-pulau, depresiasi nilai tukar, atau lonjakan harga pangan dunia. Ketika resiliensi rendah, gejolak kecil di tingkat produksi bisa berubah menjadi inflasi, kepanikan pasar, dan tekanan fiskal. Sebaliknya, bila resiliensi tinggi, guncangan bisa diredam sebelum berkembang menjadi masalah makro. Hal ini menjelaskan mengapa perencanaan pembangunan kini menekankan pendekatan integratif, termasuk pengelolaan air, energi, dan pangan secara berkelanjutan. ([Perpustakaan Bappenas](#))

2. Ketahanan Pangan dan Stabilitas Harga

Hubungan paling nyata antara pangan dan stabilitas ekonomi terlihat pada inflasi. Dalam struktur inflasi Indonesia, kelompok volatile food berulang kali menjadi sumber gejolak. Bank Indonesia melaporkan bahwa inflasi IHK Desember 2025 sebesar 2,92 persen secara tahunan masih berada dalam kisaran sasaran, tetapi inflasi volatile food mencapai 6,21 persen, terutama didorong oleh keterbatasan pasokan bawang merah akibat gangguan cuaca dan naiknya harga benih. Pada akhir 2025, BI juga kembali mencatat tekanan volatile food sebesar 5,48 persen, dengan penyebab serupa. Temuan ini memperlihatkan bahwa pengendalian inflasi di Indonesia sangat terkait dengan kemampuan menjaga pasokan dan distribusi pangan. ([Bank Indonesia](#))

Dalam teori ekonomi, inflasi pangan berbahaya karena sifatnya regresif. Kenaikan harga pangan tidak dirasakan setara oleh semua kelompok. Rumah tangga miskin biasanya mengalokasikan porsi besar pengeluarannya untuk makanan pokok, sehingga lonjakan harga beras atau telur secara proporsional lebih menyakitkan dibanding kenaikan harga barang nonesensial. Dampaknya bukan hanya pada konsumsi saat ini, tetapi juga pada kualitas gizi, pendidikan anak, dan keputusan ekonomi rumah tangga lain. Ketika harga pangan naik, keluarga miskin cenderung mengurangi kualitas makanan, menunda pengeluaran kesehatan, atau mengurangi tabungan. Pada skala nasional, hal ini menurunkan kualitas pertumbuhan ekonomi.

Kasus beras merupakan contoh paling relevan. Beras bukan hanya komoditas ekonomi, tetapi juga komoditas politik dan sosial. Kenaikan harga beras sering menjadi indikator persepsi publik tentang berhasil atau tidaknya pemerintah mengelola ekonomi. Pada 2025, World Bank mencatat bahwa harga beras ritel di Indonesia sempat melonjak tajam pada akhir Juli–Agustus, dan meskipun kemudian mereda, harga beras medium masih berada 11,9 persen di atas harga eceran tertinggi yang

telah direvisi. Ini menunjukkan bahwa bahkan ketika kebijakan stabilisasi dijalankan, tekanan beras tetap dapat melampaui ambang kenyamanan rumah tangga.

Dari perspektif kebijakan moneter, ketahanan pangan juga menentukan efektivitas Bank Indonesia dalam menjaga inflasi. Suku bunga dapat membantu menjangkar ekspektasi dan menjaga stabilitas nilai tukar, tetapi ia tidak dapat menanam padi, memperbaiki irigasi, atau memindahkan stok beras ke wilayah defisit. Karena itu, inflasi pangan adalah wilayah yang menuntut koordinasi fiskal, perdagangan, logistik, dan produksi. Inilah sebabnya pengendalian inflasi daerah, penguatan data pasokan, dan operasi stabilisasi pasar menjadi penting. Poin utamanya adalah bahwa stabilitas harga pangan merupakan prasyarat agar instrumen makroekonomi bekerja secara lebih efektif.

Narasi ini dapat dijelaskan melalui sebuah ilustrasi. Bayangkan sebuah provinsi dengan hasil panen turun karena anomali cuaca. Pasokan lokal menurun, pedagang memperkirakan kelangkaan, harga mulai naik. Kenaikan ini menyebar ke pasar tradisional, lalu ke kota-kota sekitar. Konsumen menahan pembelian barang lain agar tetap bisa membeli bahan pokok. Daya beli terhadap produk UMKM nonpangan melemah. Inflasi headline meningkat. Pemerintah daerah tertekan untuk menyalurkan bantuan, sementara pemerintah pusat harus menambah operasi pasar atau impor terbatas. Yang awalnya tampak sebagai masalah pertanian lokal berubah menjadi tekanan pada konsumsi, fiskal, dan kepercayaan publik. Di sinilah terlihat bahwa ketahanan pangan adalah penyangga stabilitas ekonomi secara sistemik.

3. Ketahanan Pangan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Struktur Produksi

Pangan sering dibahas dalam kaca mata sosial, padahal ia juga menyumbang langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan bukan sekadar sektor tradisional; ia masih menjadi sumber kerja, penghidupan, dan permintaan antara bagi banyak wilayah Indonesia. BPS mencatat bahwa pada triwulan I-2025, pertanian tumbuh 10,52 persen dan menjadi salah satu penopang penting pertumbuhan ekonomi nasional 4,87 persen. Kenaikan ini didukung oleh lonjakan produksi padi dan jagung serta meningkatnya permintaan domestik. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Dari sisi makro, pangan memengaruhi pertumbuhan melalui setidaknya lima jalur. Pertama, jalur nilai tambah primer: ketika produksi tanaman pangan meningkat, pendapatan petani naik, penyerapan tenaga kerja membaik, dan aktivitas desa menguat. Kedua, jalur industri pengolahan: hasil pertanian menjadi input bagi industri makanan dan minuman, yang merupakan salah satu subsektor manufaktur paling penting di Indonesia. Ketiga, jalur perdagangan dan logistik: distribusi pangan menggerakkan transportasi, pergudangan, kemasan, dan jasa pendukung. Keempat, jalur konsumsi: harga pangan yang stabil menjaga ruang belanja rumah tangga untuk sektor lain. Kelima, jalur investasi: sektor pangan yang stabil lebih menarik bagi investasi swasta, baik di produksi, teknologi pascapanen, rantai dingin, maupun ritel.

Jika ketahanan pangan melemah, semua jalur tersebut ikut terganggu. Produksi yang tidak stabil membuat pendapatan petani berfluktuasi. Harga yang terlalu rendah saat panen dan terlalu tinggi saat paceklik menciptakan ketidakpastian. Industri pengolahan menghadapi biaya input yang sulit diprediksi. Logistik harus menanggung biaya distribusi dari wilayah surplus ke wilayah defisit. Konsumen mengurangi belanja nonpangan. Akhirnya, pertumbuhan ekonomi menjadi kurang inklusif dan lebih rentan terhadap guncangan.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 sebesar 5,11 persen menunjukkan bahwa ekonomi nasional mampu tetap berkembang, tetapi kualitas pertumbuhan itu akan jauh lebih kokoh jika basis pangannya stabil. BPS juga mencatat PDB 2025 atas dasar harga berlaku mencapai Rp23.821,1 triliun, dengan pertumbuhan ekspor dan investasi yang solid. Namun pertumbuhan makro semacam ini memerlukan dukungan konsumsi domestik yang sehat, dan konsumsi domestik yang sehat sangat bergantung pada keterjangkauan pangan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Dalam konteks pembangunan wilayah, pangan juga berfungsi sebagai jangkar ekonomi daerah. Banyak provinsi bertumpu pada pertanian sebagai sumber pertumbuhan dan lapangan kerja. Ketika pertanian tumbuh, permintaan terhadap jasa lokal ikut bergerak: kios input, bengkel, transportasi, pasar, dan jasa keuangan mikro. Karena itu, kebijakan ketahanan pangan sesungguhnya adalah kebijakan pembangunan wilayah. Ia membantu menahan urbanisasi berlebihan, menopang ekonomi desa, dan menjaga sirkulasi pendapatan di daerah.

4. Pangan, Daya Beli, Kemiskinan, dan Ketimpangan

Stabilitas ekonomi tidak boleh dipahami hanya sebagai rendahnya inflasi agregat atau terjaganya pertumbuhan PDB. Stabilitas yang sejati harus tercermin pada kemampuan rumah tangga mempertahankan konsumsi yang layak. Dari sudut ini, ketahanan pangan berperan sentral karena pangan merupakan komponen kebutuhan paling dasar. Ketika harga pangan melonjak, kelompok rentan paling dahulu terdorong ke bawah garis kesejahteraan.

FAO menegaskan bahwa inflasi pangan tinggi merusak daya beli dan akses terhadap diet sehat, terutama bagi populasi berpendapatan

rendah. Di Indonesia, FAO di tingkat kantor negara mencatat hampir separuh penduduk tidak mampu membeli makanan sehat dan bergizi. Ini adalah peringatan penting: ekonomi dapat tumbuh, tetapi bila diet sehat tetap tidak terjangkau, maka pertumbuhan tersebut tidak sepenuhnya diterjemahkan menjadi kesejahteraan substantif. ([FAOHome](#))

Masalah ketahanan pangan di Indonesia juga merupakan masalah ketimpangan. Sebagian wilayah relatif dekat dengan sentra produksi, infrastruktur jalan, pelabuhan, dan pergudangan yang memadai; wilayah lain menghadapi ongkos distribusi tinggi, ketergantungan pasokan dari luar, dan volatilitas harga yang lebih tajam. Akibatnya, akses pangan tidak seragam. Dalam negara kepulauan, satu harga nasional sering kali tidak berarti satu realitas nasional. Harga cabai, beras, atau telur dapat sangat berbeda antarwilayah, dan perbedaan itu mengandung makna sosial yang besar.

Ketimpangan juga terjadi antar-kelompok produsen. Petani kecil sering berhadapan dengan masalah akses input, lahan yang sempit, irigasi terbatas, posisi tawar rendah, dan keterbatasan pembiayaan. Mereka kerap menerima harga rendah saat panen raya karena lemahnya fasilitas penyimpanan dan pascapanen, namun menanggung biaya hidup tinggi ketika harga pangan naik di luar musim panen. Dengan kata lain, produsen pangan tidak selalu menjadi penerima manfaat utama dari naiknya harga pangan. Di sinilah paradoks sistem pangan Indonesia: petani dapat tetap miskin, sementara konsumen juga terbebani.

Ketahanan pangan yang baik harus memecahkan paradoks ini dengan dua sasaran sekaligus: harga yang wajar bagi konsumen dan pendapatan yang layak bagi produsen. Sasaran ganda ini tidak mudah, tetapi justru di situlah kecerdasan kebijakan diuji. Negara perlu membangun mekanisme yang mengurangi kerugian pascapanen, memperkuat koperasi atau kelembagaan petani, mengefisienkan distribusi, dan menggunakan cadangan pangan secara presisi. Bila berhasil, rumah

tangga akan lebih terlindungi dari lonjakan harga, sementara petani memperoleh pasar yang lebih stabil.

5. Dimensi Nutrisi: Ketahanan Pangan bukan Hanya Soal Perut Kenyang

Salah satu kekeliruan lama dalam wacana pangan adalah menyamakannya dengan sekadar ketersediaan kalori, khususnya beras. Pendekatan itu terlalu sempit. Ketahanan pangan modern harus mencakup kualitas gizi. Sebab, tujuan akhir sistem pangan bukan hanya membuat masyarakat kenyang, tetapi membuat masyarakat sehat, produktif, dan mampu berkembang.

Di sinilah hubungan antara pangan dan ekonomi menjadi semakin dalam. Kekurangan gizi kronis menurunkan kualitas modal manusia. Anak yang mengalami stunting berisiko memiliki capaian kognitif dan produktivitas yang lebih rendah di masa depan. FAO di Indonesia mengutip data 2023 bahwa 21,5 persen anak di bawah lima tahun masih stunted. Angka ini menunjukkan bahwa tantangan pangan Indonesia bukan semata produksi beras, tetapi transformasi diet dan perbaikan akses ke pangan bergizi. ([FAOHome](#))

Dalam ekonomi jangka panjang, nutrisi adalah investasi. Tenaga kerja yang sehat lebih produktif, lebih jarang sakit, dan lebih mampu beradaptasi dengan tuntutan ekonomi digital maupun industri modern. Sebaliknya, kekurangan gizi menimbulkan biaya tersembunyi: beban kesehatan, rendahnya prestasi belajar, turunnya produktivitas, dan reproduksi kemiskinan antargenerasi. Maka, setiap kebijakan pangan yang hanya menghitung tonase tanpa mempertimbangkan gizi pada dasarnya sedang menyelesaikan satu masalah sambil membiarkan masalah lain tumbuh.

Narasi ini penting bagi Indonesia karena transformasi ekonomi menuju negara berpendapatan lebih tinggi memerlukan kualitas SDM yang jauh lebih baik. Jika sistem pangan masih menghasilkan diet yang tidak sehat atau tidak terjangkau, maka agenda bonus demografi dapat terhambat. Oleh sebab itu, stabilitas ekonomi Indonesia memerlukan stabilitas pangan yang sehat, bukan hanya murah.

6. Tantangan Struktural Ketahanan Pangan Indonesia

Mengapa ketahanan pangan Indonesia masih rapuh dalam banyak sisi? Jawabannya bersifat struktural.

Pertama, tekanan perubahan iklim. Indonesia menghadapi ancaman kekeringan, banjir, pergeseran musim tanam, naiknya suhu malam, dan gangguan terhadap tanaman utama seperti padi dan jagung. World Bank dalam profil risiko iklim Indonesia menegaskan bahwa perubahan iklim akan berdampak pada pertanian dan ketahanan pangan. Gangguan iklim ini menurunkan prediktabilitas produksi dan meningkatkan biaya adaptasi bagi petani. ([Climate Knowledge Portal](#))

Kedua, alih fungsi lahan dan keterbatasan sumber daya produksi. Pemerintah sendiri menyoroti perlunya pengendalian alih fungsi lahan sawah untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Jika lahan produktif terus menyusut karena tekanan urbanisasi dan konversi penggunaan lahan, maka peningkatan produksi akan makin sulit dicapai tanpa lompatan produktivitas. ([Bappenas](#))

Ketiga, kelemahan rantai pasok dan tingginya food loss and waste. FAO menyebut level food loss and waste global sekitar 30 persen dan menegaskan dampaknya terhadap ketahanan pangan, pendapatan, sumber daya alam, dan emisi. Untuk Indonesia, FAO mengutip studi Bappenas 2021 bahwa pengelolaan food loss and waste yang lebih baik

dapat memberi makan sepertiga populasi. Ini angka yang sangat penting secara moral dan ekonomi. Artinya, sebagian persoalan pangan bukan karena Indonesia kekurangan produksi absolut, melainkan karena kehilangan nilai di sepanjang rantai pasok. ([FAOHome](#))

Keempat, konsentrasi pada komoditas tertentu, terutama beras. Ketergantungan budaya dan kebijakan yang terlalu berat pada beras membuat sistem pangan kurang terdiversifikasi. Ketika satu komoditas dominan terganggu, tekanan terhadap ekonomi nasional menjadi besar. Diversifikasi pangan lokal—sagu, singkong, jagung, umbi-umbian, serta penguatan protein hewani dan hortikultura—bukan hanya agenda budaya, tetapi strategi resiliensi ekonomi.

Kelima, kualitas data dan tata kelola. Ketahanan pangan modern memerlukan data real-time tentang luas panen, stok, distribusi, harga, konsumsi, dan risiko cuaca. Tanpa data yang akurat, kebijakan sering terlambat atau terlalu umum. Workshop FAO dan BPS mengenai perbaikan data food loss menunjukkan bahwa kualitas data masih menjadi medan kerja penting di Indonesia. ([FAOHome](#))

7. Peran Negara, Pasar, dan Tata Kelola Kebijakan

Sistem pangan yang stabil tidak lahir dari pasar murni atau negara yang dominan secara tunggal; ia lahir dari tata kelola yang mampu menyeimbangkan keduanya. Pasar diperlukan untuk efisiensi, sinyal harga, inovasi, dan investasi. Negara diperlukan untuk koreksi kegagalan pasar, perlindungan kelompok rentan, penyediaan infrastruktur, dan stabilisasi pada saat guncangan.

Dalam konteks Indonesia, pemerintah memiliki beberapa instrumen utama: perencanaan nasional, kebijakan cadangan pangan, operasi stabilisasi, dukungan produksi, perlindungan lahan, bantuan sosial, dan

koordinasi inflasi pusat-daerah. Bappenas menempatkan transformasi sistem pangan dan ketahanan pangan sebagai prioritas RPJMN 2025–2029, termasuk penekanan pada swasembada pangan, inovasi pertanian, dan pendekatan nexus pangan–energi–air. ([Bappenas](#))

Kehadiran cadangan strategis beras penting, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya jawaban. Cadangan ibarat sabuk pengaman; ia berguna saat darurat, tetapi tidak menyelesaikan kelemahan mesin. Ketahanan pangan jangka panjang tetap ditentukan oleh produktivitas, efisiensi distribusi, reformasi kelembagaan petani, akses pembiayaan, riset benih, irigasi, dan digitalisasi data pangan. Negara yang terlalu bergantung pada tindakan reaktif akan terus berada dalam mode pemadaman kebakaran.

Di sisi lain, investasi swasta perlu diarahkan untuk memperkuat seluruh rantai nilai: gudang modern, cold chain, pengolahan, asuransi pertanian, teknologi cuaca, platform distribusi, hingga pembiayaan berbasis data. Ketika negara menciptakan kepastian kebijakan dan infrastruktur dasar, swasta dapat membantu meningkatkan efisiensi dan menekan kehilangan pascapanen. Dengan demikian, ketahanan pangan menjadi hasil kolaborasi antara kebijakan publik yang cerdas dan dinamika pasar yang sehat.

8. Teknologi, Data, dan Transformasi Sistem Pangan

Ketahanan pangan Indonesia ke depan tidak mungkin dibangun dengan pola lama semata. Transformasi digital perlu menjadi bagian integral. Teknologi dapat membantu pada tiga level.

Pertama, level produksi. Pemanfaatan data cuaca, sensor tanah, pemetaan lahan, dan varietas adaptif dapat meningkatkan produktivitas sekaligus menekan risiko gagal panen. World Bank menekankan

pentingnya climate-smart agriculture untuk meningkatkan produktivitas, adaptasi, dan mitigasi dalam menghadapi perubahan iklim. ([World Bank](#))

Kedua, level distribusi dan logistik. Data harga real-time, integrasi rantai pasok, dan sistem pelacakan distribusi dapat membantu mendeteksi kekurangan pasokan lebih dini. Dalam negara kepulauan, efisiensi logistik pangan sama pentingnya dengan produksi. Pangan yang cukup di satu wilayah tidak otomatis berarti pangan tersedia terjangkau di wilayah lain.

Ketiga, level tata kelola. Dashboard nasional dan daerah yang menggabungkan data produksi, stok, harga, curah hujan, lalu lintas distribusi, dan kerentanan rumah tangga akan sangat membantu pengambilan keputusan. Di masa depan, kecerdasan buatan dapat digunakan untuk prediksi panen, prediksi harga, alokasi operasi pasar, dan identifikasi titik rawan inflasi pangan.

Namun teknologi sendiri bukan obat mujarab. Ia harus dibarengi kapasitas kelembagaan, kualitas data, pelatihan petani, dan interoperabilitas antar-instansi. Tanpa itu, digitalisasi hanya menghasilkan banyak aplikasi tetapi sedikit keputusan yang lebih baik.

9. Ketahanan Pangan sebagai Fondasi Stabilitas Sosial dan Politik

Di banyak negara, ketidakstabilan pangan sering menjadi pemicu keresahan sosial. Indonesia memiliki sejarah panjang yang menunjukkan betapa sensitifnya isu harga pangan terhadap persepsi publik. Ketika harga pangan terkendali, masyarakat merasakan stabilitas secara langsung. Ketika harga melonjak, rasa aman ekonomi cepat menurun.

Karena itu, ketahanan pangan juga merupakan modal politik pembangunan. Pemerintah yang mampu menjaga harga pangan relatif stabil memperoleh ruang kepercayaan yang lebih besar untuk

mendorong reformasi lain. Sebaliknya, kegagalan menjaga pangan sering menggerus legitimasi kebijakan bahkan ketika indikator makro lain tampak baik. Dalam pengertian ini, pangan adalah titik temu antara ekonomi, sosial, dan politik.

Tetapi stabilitas politik yang sehat tidak boleh dibangun hanya lewat intervensi jangka pendek. Ia harus didasarkan pada keadilan sistem pangan: petani memperoleh insentif yang memadai, konsumen memperoleh harga wajar, dan anak-anak memperoleh gizi cukup. Bila ketiga tujuan ini bertemu, ketahanan pangan benar-benar menjadi fondasi stabilitas nasional.

10. Arah Strategis bagi Indonesia

Untuk menempatkan ketahanan pangan sebagai fondasi stabilitas ekonomi, Indonesia perlu mendorong beberapa arah strategis.

Pertama, berpindah dari orientasi komoditas ke orientasi sistem pangan. Produksi beras tetap penting, tetapi kebijakan harus melihat keseluruhan sistem: protein, hortikultura, pangan lokal, nutrisi, distribusi, dan limbah pangan.

Kedua, memperkuat produktivitas berbasis adaptasi iklim. Investasi irigasi, riset benih, asuransi pertanian, penyuluhan, dan climate-smart agriculture harus diprioritaskan karena risiko iklim adalah risiko ekonomi nasional. ([World Bank](#))

Ketiga, menekan food loss and waste. Ini adalah "produksi baru" yang sering diabaikan. Jika kehilangan pangan berkurang, Indonesia dapat meningkatkan ketersediaan dan menurunkan tekanan harga tanpa selalu membuka lahan baru. ([FAOHome](#))

Keempat, membangun logistik pangan yang lebih efisien dan berkeadilan wilayah. Gudang, cold chain, pelabuhan, distribusi antarpulau, dan sistem data harga harus diperkuat agar wilayah defisit tidak terus menanggung harga lebih mahal.

Kelima, menghubungkan kebijakan pangan dengan kebijakan sosial. Bantuan sosial, program gizi, makan bergizi, dan intervensi stunting harus menjadi bagian dari sistem pangan, bukan kebijakan terpisah. Karena tujuan akhirnya bukan hanya stabilitas harga, tetapi juga kualitas manusia.

Keenam, memperkuat tata kelola data. Keputusan yang cepat memerlukan data yang cepat. Indonesia membutuhkan sistem peringatan dini pangan yang lebih akurat, terintegrasi, dan dapat ditindaklanjuti lintas kementerian dan pemerintah daerah. ([FAOHome](#))

Ketujuh, menata hubungan negara dan pasar secara seimbang. Negara perlu kuat dalam regulasi, data, cadangan, dan infrastruktur; pasar perlu aktif dalam inovasi, pembiayaan, dan efisiensi rantai pasok. Ketahanan pangan yang sehat tidak anti-pasar, tetapi juga tidak naif terhadap kegagalan pasar.

Kesimpulan

Ketahanan pangan adalah fondasi stabilitas ekonomi Indonesia karena ia memengaruhi langsung inflasi, daya beli, pertumbuhan, kemiskinan, kualitas SDM, dan stabilitas sosial. Fakta empiris beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa gejolak pangan—khususnya pada komoditas strategis seperti beras, bawang, cabai, telur, dan daging ayam—dapat dengan cepat menjadi sumber tekanan inflasi. Pada saat yang sama, ketika pertanian tumbuh kuat, seperti pada triwulan I-2025, sektor ini

mampu menopang pertumbuhan nasional secara signifikan. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Namun ketahanan pangan Indonesia masih menghadapi tantangan besar: perubahan iklim, alih fungsi lahan, lemahnya logistik, tingginya food loss and waste, ketergantungan pada komoditas tertentu, dan belum meratanya akses terhadap diet sehat. FAO mengingatkan bahwa inflasi pangan tinggi melemahkan daya beli dan akses pada makanan bergizi, sementara data di Indonesia menunjukkan masih besarnya tantangan stunting dan keterjangkauan diet sehat. ([FAOHome](#))

Karena itu, agenda ketahanan pangan tidak boleh dipersempit menjadi isu panen atau impor semata. Ia harus diposisikan sebagai agenda transformasi sistem pangan nasional. Indonesia memerlukan strategi yang menggabungkan produksi yang tangguh iklim, perlindungan lahan, efisiensi logistik, pengurangan kehilangan pangan, diversifikasi konsumsi, penguatan data, dan integrasi kebijakan pangan dengan kebijakan gizi serta perlindungan sosial. Pendekatan inilah yang sejalan dengan arah pembangunan nasional 2025–2029 yang menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas strategis. ([Bappenas](#))

Dalam bahasa manajemen, pangan bukan hanya “sektor”; ia adalah infrastruktur kehidupan. Dalam bahasa ekonomi, pangan bukan hanya “komoditas”; ia adalah penentu kestabilan sistem. Dan dalam bahasa kebijakan publik, ketahanan pangan bukan pilihan tambahan, melainkan syarat dasar agar Indonesia dapat tumbuh lebih tinggi, lebih merata, dan lebih tahan terhadap guncangan global. Jika fondasi ini kokoh, maka stabilitas ekonomi Indonesia tidak hanya akan bertahan, tetapi juga menjadi lebih inklusif, lebih manusiawi, dan lebih berkelanjutan.

Glosarium

Ketahanan pangan: kondisi ketika seluruh penduduk memiliki ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas terhadap pangan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau.

Sistem pangan: keseluruhan rangkaian dari produksi, distribusi, pengolahan, pemasaran, konsumsi, hingga pengelolaan limbah pangan.

Volatile food: kelompok komoditas pangan yang harganya mudah bergejolak akibat perubahan pasokan, musim, cuaca, atau distribusi.

Inflasi pangan: kenaikan harga pangan yang berlangsung dalam periode tertentu dan memengaruhi biaya hidup rumah tangga.

Daya beli: kemampuan rumah tangga untuk membeli barang dan jasa dengan pendapatan yang dimiliki.

Cadangan pangan strategis: stok pangan yang dikelola untuk stabilisasi pasokan dan harga pada saat terjadi gejolak.

Food loss: kehilangan pangan yang terjadi pada tahap produksi, panen, penyimpanan, dan distribusi sebelum mencapai konsumen.

Food waste: terbuangnya pangan di tingkat ritel, layanan makanan, atau rumah tangga.

Diversifikasi pangan: upaya memperluas sumber pangan agar tidak terlalu bergantung pada satu komoditas utama.

Climate-smart agriculture: pendekatan pertanian yang meningkatkan produktivitas, memperkuat adaptasi iklim, dan menekan emisi.

Stunting: kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan faktor kesehatan lainnya.

Nexus pangan–energi–air: pendekatan kebijakan yang melihat keterkaitan erat antara pengelolaan pangan, energi, dan air.

Daftar Pustaka

Badan Pusat Statistik. (2025, 5 Mei). *Ekonomi Indonesia tetap tumbuh di tengah ketidakpastian global*. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Badan Pusat Statistik. (2026, 5 Februari). *Ekonomi Indonesia tahun 2025 tumbuh 5,11 persen*. ([Badan Pusat Statistik Indonesia](#))

Bank Indonesia. (2026, 28 Januari). *Laporan Kebijakan Moneter Triwulan IV 2025*. ([Bank Indonesia](#))

Bank Indonesia. (2025, 23 Desember). *BI-Rate tetap 4,75%: Mendorong pertumbuhan ekonomi, menjaga stabilitas*. ([Bank Indonesia](#))

Bappenas. (2025, 19 Februari). *Perkuat strategi ketahanan pangan dalam RPJMN 2025–2029*. ([Bappenas](#))

Bappenas. (2025). *Ringkasan RPJMN 2025–2029*. ([Perpustakaan Bappenas](#))

Food and Agriculture Organization. (2025). *The State of Food Security and Nutrition in the World 2025*. ([FAOHome](#))

Food and Agriculture Organization Indonesia. (2025, 5 Mei). *Bappenas, FAO hold training workshop to improve governance in Indonesia's agrifood systems transformation*. ([FAOHome](#))

Food and Agriculture Organization Indonesia. (2025, 4 Juli). *Stakeholder workshop—Food loss index calculation in Indonesia project*. ([FAOHome](#))

Food and Agriculture Organization Indonesia. (2025, 12 Desember). *Statistics Indonesia, FAO host workshop to improve food loss data*. ([FAOHome](#))

World Bank. (2025, 19 September). *Food Security Update*.

World Bank. (2025, 13 Juni). *Food Security Update 117*. ([The World Bank](#))

World Bank. (2021). *Climate-smart agriculture in Indonesia*. ([World Bank](#))

Rudy C Tarumingkeng: *Ketahanan Pangan sebagai Fondasi Stabilitas
Ekonomi Indonesia*

World Bank. *Climate Risk Country Profile: Indonesia*. ([Climate Knowledge Portal](#))

Copilot for this article - Chatgpt 5.2 Thinking. Access date: 6 Maret 2026
Prompting on Writer's account ([Rudy C Tarumingkeng](#))

<https://chatgpt.com/c/69aa827e-b5bc-8398-9c31-72a3ba4d566b>